

Representasi Resistensi Netizen Melalui Karya Visual Meme Pajak di Instagram (Analisis Semiotika Roland Barthes)

Dani Siswardhani Wahjono¹, Iche Hilvania², Radyta Achmad Burhanuddin³

^{1,2,3} Universitas Dian Nusantara

Jl. Tanjung Duren Barat II No. 1, Grogol, Jakarta Barat. 11470. Indonesia.

e-mail: ¹ dani.siswardhani.wahjono@dosen.undira.ac.id, ² iche.hilvania@dosen.undira.ac.id,

³ radyta.achmad@dosen.undira.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi kritik sosial terhadap kebijakan pajak dalam meme digital di Instagram dengan menggunakan teori Semiotika Roland Barthes dan Representasi Stuart Hall. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis semiotika, di mana data berupa dua meme yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi isu kenaikan pajak dan viralitasnya di media sosial. Analisis dilakukan dengan menelaah level denotasi, konotasi, dan mitos pada Barthes, serta tiga dimensi representasi Hall (reflektif, intensional, konstruksionis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada level denotasi, tanda visual hanya menampilkan ilustrasi sederhana mengenai beban pajak. Namun, pada level konotasi, tanda tersebut memuat sindiran dan kritik atas ketidakadilan sistem perpajakan. Pada tahap mitos, pajak direpresentasikan sebagai simbol eksploitasi rakyat oleh negara. Analisis representasi Hall memperlihatkan bahwa meme merefleksikan keresahan publik, mengandung maksud satiris kreator, serta membangun konstruksi sosial baru atas wacana pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meme digital berfungsi sebagai teks budaya yang tidak hanya menghadirkan humor, tetapi juga sebagai medium kritik dan perlawanan simbolik terhadap wacana dominan negara.

Kata kunci: Semiotika, Representasi, Meme Digital

ABSTRACT

This study aims to analyze the representation of social criticism toward tax policies in digital memes on Instagram using Roland Barthes' Semiotics and Stuart Hall's Representation theory. Employing a qualitative approach with semiotic analysis, this research examines two memes purposively selected based on their relevance to the issue of tax increases and their circulation in social media. The analysis explores Barthes' levels of denotation, connotation, and myth, as well as Hall's three dimensions of representation (reflective, intentional, and constructionist). The findings reveal that, at the denotative level, visual signs merely depict a simple illustration of tax burdens. However, at the connotative level, the signs convey satire and criticism of the unfair taxation system. At the myth level, tax is represented as a symbol of people's exploitation by the state. Hall's representation analysis demonstrates that memes reflect public anxiety, carry the satirical intentions of the creators, and construct a new social discourse about taxation. This study concludes that digital memes function as cultural texts that not only provide humor but also serve as mediums of criticism and symbolic resistance against the dominant state discourse.

Keywords: Semiotics, Representation, Digital Memes

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, isu perpajakan di Indonesia menjadi topik hangat yang memicu banyak diskusi publik, baik di ruang formal maupun di media sosial. Salah topik hangatnya adalah rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang diberlakukan mulai 1 Januari 2025 sebagai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tarif baru ini masih tergolong rendah dibanding negara lain, dan pemerintah tetap mengecualikan barang kebutuhan pokok serta jasa strategis seperti pendidikan dan kesehatan (Detik.com, 2024).

Sebagian kalangan menilai kenaikan ini berpotensi menekan daya beli masyarakat kelas menengah dan menambah beban ekonomi di tengah pemulihan pasca-pandemi. Di sisi lain, pemerintah tidak akan mengenakan pajak baru atau kenaikan tarif tambahan pada 2026,

melainkan fokus pada reformasi sistem perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak (DDTCNews, 2025). Namun, ketegasan tersebut tidak serta-merta meredakan skeptisisme publik terhadap arah kebijakan fiskal. Fenomena ini melahirkan gelombang resistensi masyarakat dalam bentuk kritik, satire, hingga ekspresi kreatif yang tersebar luas di media sosial. Salah satu bentuk ekspresi tersebut adalah meme politik bertema pajak. Meme, yang pada awalnya merupakan konsep dalam biologi evolusioner, kini telah berkembang menjadi artefak budaya digital yang berfungsi sebagai sarana komunikasi massa. Dalam konteks komunikasi politik, meme dipandang sebagai medium yang efektif dalam menyampaikan kritik sosial, karena sifatnya ringan, cepat viral, mudah dipahami, dan penuh dengan simbol-simbol budaya populer yang dekat dengan masyarakat (Milner, 2016).

titik penting dalam hubungan antara negara dengan rakyatnya. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji bagaimana meme pajak direpresentasikan dan berpotensi dikomodifikasi dalam ruang publik digital.

1. Meme Digital sebagai Budaya Komunikasi

Internet meme bukan hanya hiburan semata, tapi juga bagian dari komunikasi publik yang mencerminkan bagaimana masyarakat merespons kondisi sosial, ekonomi, politik melalui cara yang bisa viral dan diulang-ulang (Bastari, Lukito, & Adhika, 2021). Dalam ranah digital, konsep ini mengalami pergeseran makna menjadi internet meme, yaitu potongan konten berupa gambar, teks, video, atau audio yang dapat disebar, disunting ulang, dan diadaptasi secara luas oleh pengguna media sosial (Shifman dalam Zhang, 2023).

Meme digital berfungsi tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media kritik sosial, wacana politik, hingga bentuk solidaritas komunitas. Meme mampu merangkum isu-isu kompleks dalam bentuk yang lucu, satir, atau ironis, sehingga lebih mudah diterima dan dipahami khalayak luas. Dalam konteks ini, meme menjadi sarana untuk mendekonstruksi realitas sosial dan membentuk opini publik.

Meme dapat digunakan dalam konteks pendidikan untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami (Subbiramanian et al, 2022).

Dalam konteks komunikasi politik, meme berfungsi sebagai medium partisipasi warga yang unik karena menggabungkan humor, sarkasme, dan kritik sosial dalam bentuk yang ringkas dan mudah dipahami. Milner (2016) menekankan bahwa meme memungkinkan "*public conversation*" melalui participatory media, di mana masyarakat dapat berkontribusi dalam diskursus politik tanpa harus berada dalam forum formal.

Meme politik di Indonesia berkembang seiring dengan meningkatnya penetrasi media sosial. Fenomena meme pajak adalah salah satu contohnya, di mana masyarakat mengekspresikan keresahan terhadap kebijakan fiskal negara melalui visual-visual sederhana yang mengandung makna kritis. Meme dapat dipahami sebagai teks budaya sekaligus praktik sosial yang sarat dengan makna politis.

2. Teori Representasi

Menurut Marcel Danesi, representasi adalah proses di mana pengetahuan, ide, dan pesan direkam. Lebih lanjut, representasi dapat diartikan sebagai penggunaan tanda seperti simbol, gambar, suara, dan sejenisnya, untuk menunjukkan sesuatu yang dapat dilihat, dibayangkan, atau dirasakan dalam bentuk fisik khusus (Safitri, 2023).

Menurut kajian kontemporer terhadap teori representasi yang dikembangkan oleh Stuart Hall, makna tidak pernah berdiri secara alami, tetapi selalu dibentuk melalui proses sosial dan praktik komunikasi. Hall mengemukakan tiga pendekatan utama untuk memahami bagaimana representasi bekerja dalam budaya: reflektif, intensional, dan konstruksionis (Fuchs, 2023).

Pendekatan reflektif memandang bahwa makna sudah ada dalam dunia nyata—melalui objek, peristiwa, dan pengalaman—dan media hanya berfungsi sebagai cermin yang memantulkan realitas tersebut (Wahyudi, 2020). Dalam kerangka ini, representasi dianggap merepresentasikan sesuatu yang sudah ada sebelumnya, sehingga keakuratan menjadi ukuran utama.

Pendekatan intensional berangkat dari gagasan bahwa makna berasal dari niat subjek pencipta. Bahasa, baik lisan maupun tulisan, digunakan sebagai alat untuk menyalurkan pesan dan makna yang dimaksudkan secara unik oleh pengirim (Dhobi, 2022). Pandangan ini menegaskan bahwa bahasa bukan sekadar medium pasif, melainkan perangkat aktif yang memproduksi makna.

Pendekatan konstruksionis menolak pandangan bahwa makna melekat pada dunia material maupun semata-mata pada niat pencipta. Dalam pendekatan ini, makna dibangun melalui sistem tanda, wacana, dan interaksi sosial yang berlangsung dalam konteks budaya dan kekuasaan (Fuchs, 2023). Representasi dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang selalu dinegosiasikan dalam proses komunikasi antara media, khalayak, dan realitas.

Melalui teori ini, menunjukkan bahwa media dan budaya populer berperan penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu sosial, politik, maupun budaya. Representasi tidak hanya menghasilkan pemahaman tentang realitas, tetapi juga dapat mereproduksi ideologi tertentu, membangun stereotip, atau bahkan menjadi sarana resistensi terhadap kekuasaan.

3. Semiotika Roland Barthes

Semiotika Roland Barthes merupakan pengembangan dari tradisi strukturalis yang melihat tanda sebagai sistem makna yang berlapis. Barthes membagi tanda ke dalam dua tingkatan: denotasi dan konotasi. Denotasi merujuk pada makna literal atau makna yang tampak secara langsung, sedangkan konotasi mencakup makna kultural, ideologis, serta asosiasi yang melekat pada tanda dalam konteks tertentu (Barthes, 2015).

Dalam perkembangan teori komunikasi kontemporer, pendekatan Barthes banyak digunakan untuk membaca teks media, iklan, hingga meme digital. Misalnya, teks visual atau gambar tidak hanya dimaknai sebagai representasi objek, tetapi juga mengandung mitos sosial yang menanamkan ideologi tertentu (Chandler, 2017).

Dalam konteks media digital, semiotika Barthes dipakai untuk membongkar bagaimana budaya populer menciptakan wacana melalui simbol. Analisis semiotika Barthes sangat relevan dalam membongkar lapisan makna dalam meme pajak. Misalnya, sebuah meme yang menampilkan gambar karung uang dengan tulisan "pajak rakyat" secara denotatif hanya menunjukkan objek uang, namun pada tingkat konotasi, ia melambangkan keserakahan negara. Pada tingkat mitos, meme tersebut merepresentasikan ideologi bahwa negara selalu mengorbankan rakyat demi kepentingan elite.

Pendekatan Barthes membantu memahami bagaimana meme pajak berfungsi tidak hanya sebagai humor visual,

tetapi juga sebagai arena produksi dan reproduksi ideologi perlawanan terhadap negara.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis semiotika. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha memahami makna di balik fenomena representasi sosial yang termuat dalam meme digital. Seperti yang diungkapkan Creswell (2018), penelitian kualitatif berorientasi pada pemahaman interpretatif dan eksploratif terhadap pengalaman manusia dalam konteks tertentu.

Data penelitian ini bersumber dari data primer berupa konten visual (gambar meme) yang diambil dari akun Instagram @redi_redz dan @wirtams. Pemilihan akun Instagram didasarkan pada pertimbangan bahwa platform ini merupakan salah satu ruang utama distribusi meme di Indonesia dan memiliki basis pengguna yang luas di kalangan anak muda, pekerja kreatif, hingga komunitas digital. Instagram juga memfasilitasi sirkulasi pesan visual dengan cepat melalui fitur repost, story, dan algoritma yang menonjolkan konten populer.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi digital dan studi kepustakaan. Dokumentasi digital untuk menelusuri akun Instagram yang sering membuat meme politik dan sosial, dan studi kepustakaan untuk memperkuat landasan teori.

Analisis data menggunakan kerangka semiotika Roland Barthes yang terdiri atas tiga tingkatan makna yaitu, (1) denotasi, makna literal yang tampak secara langsung dalam teks visual, (2) konotasi, makna implisit yang dibentuk oleh asosiasi budaya, politik, dan social, dan (3) mitos, wacana dominan atau narasi besar yang direproduksi melalui meme.

Selain semiotika, analisis juga memanfaatkan konsep representasi dari Stuart Hall untuk mengurai bagaimana realitas kenaikan pajak dikonstruksikan dan disebarkan dalam ruang digital. Hall menekankan bahwa representasi bukan sekadar refleksi realitas, tetapi proses aktif membentuk makna melalui bahasa, tanda, dan simbol.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Meme dalam penelitian ini diambil dari akun Instagram @redi_redz dan @wirtams yang sesuai dengan tema penelitian.



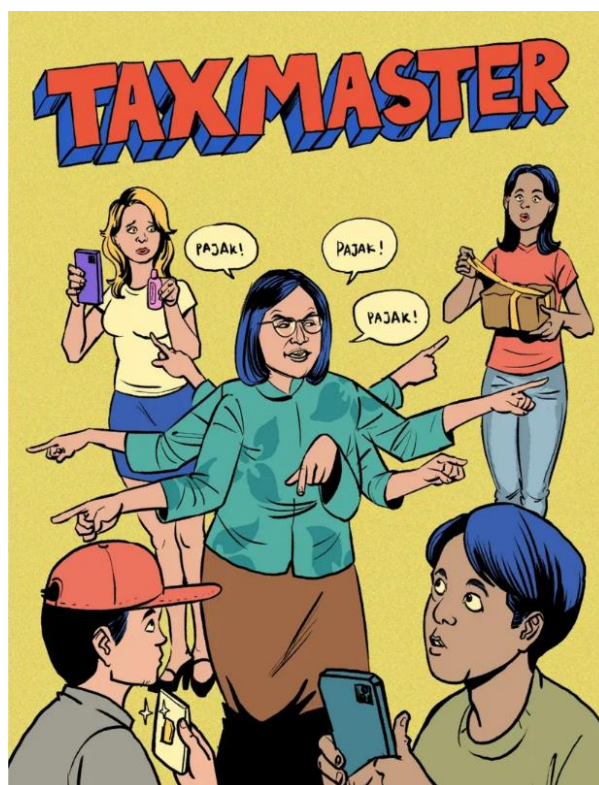
Sumber: <https://www.instagram.com/p/DNQJkJBucR/?hl=en>

Gambar 3. Karya Visual Meme akun @redi_redz

Tabel 1. Analisis Semiotika Roland Barthes Gambar

Makna	Tanda	Penjelasan
Denotasi	<ul style="list-style-type: none"> Sosok perempuan paruh baya duduk di kursi, berpakaian formal, dengan ekspresi serius. Teks balon: "Pajak apa lagi ya..." Orang-orang di bawah kursi dengan ekspresi tertekan, tubuh merunduk, memikul papan bertuliskan berbagai jenis pajak. 	<ul style="list-style-type: none"> Menampilkan sosok pejabat negara. Teks menggambarkan proses pemikiran terkait wacana penambahan jenis pajak baru. Ilustrasi menghadirkan rakyat sebagai pihak yang harus memikul beban pajak.
Konotasi	<ul style="list-style-type: none"> Posisi duduk di kursi besar dengan sikap dominan. Kalimat "Pajak apa lagi ya..." Tubuh rakyat yang merunduk dan tertindih papan pajak. 	<ul style="list-style-type: none"> Menampilkan representasi pejabat pemerintah yang dapat diidentifikasi dengan figur Menteri Keuangan. Pernyataan teks mengindikasikan adanya proses pemikiran mengenai wacana penambahan jenis pajak baru. Gambaran visual memperlihatkan rakyat sebagai pihak yang diposisikan

		menanggung beban pajak.
Mitos	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak sebagai instrumen negara. - Relasi negara dan rakyat. - Kritik terhadap hegemoni birokrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pajak justru direpresentasikan sebagai mitos penindasan yang dilakukan negara terhadap warganya. - Negara diposisikan layaknya predator, sedangkan rakyat digambarkan sebagai pihak yang pasif dan terus-menerus menjadi korban. - Birokrasi berorientasi pada keuntungan semata tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: <https://www.instagram.com/p/DM7BkaTx-Kr/?hl=en>

Gambar 4. Karya Visual Meme akun @wirtams

Gambar ini membangun narasi besar tentang pajak sebagai simbol penindasan birokrasi dan ekonomi. Negara digambarkan sebagai kekuasaan hegemonik yang tidak pernah puas, selalu mencari celah untuk memperluas objek pajak, sementara rakyat dianggap sebagai subjek pasif yang menjadi korban. Mitos yang hadir adalah bahwa pajak tidak lagi dipersepsi sebagai instrumen pembangunan kolektif, melainkan sebagai alat eksploitasi negara terhadap warganya.

Dalam kerangka representasi, gambar 1 dianalisis melalui tiga pendekatan:

- Reflektif, meme ini mencerminkan realitas sosial di Indonesia, di mana masyarakat merasa terbebani dengan banyaknya jenis pajak.
- Intensional, kreator gambar secara sadar menyampaikan kritik bahwa pemerintah terlalu sering mencari sumber pajak baru. Kalimat "Pajak apa lagi ya..." merupakan intensi sindiran.
- Konstruksionis, makna tidak datang dari realitas semata, tetapi dikonstruksi melalui simbol visual: kursi tinggi sebagai simbol kekuasaan, rakyat terhimpit sebagai simbol penderitaan, serta papan-papan pajak sebagai representasi beban ekonomi yang menyelimuti semua aspek kehidupan.

Representasi yang terbentuk pada gambar 1 adalah adanya relasi kuasa yang timpang antara pemerintah (digambarkan dominan, berkuasa, nyaman) dengan rakyat (digambarkan menderita, tertindas, dan tak berdaya).

Tabel 2. Analisis Semiotika Roland Barthes Gambar

Makna	Tanda	Penjelasan
Denotasi	<ul style="list-style-type: none"> - Tulisan besar "TAXMASTER". - Sosok perempuan paruh baya dengan banyak tangan. - Orang-orang di sekitarnya memegang benda sehari-hari (ponsel, makanan, uang). - Ucapan "Pajak!" yang keluar dari sosok utama. 	<ul style="list-style-type: none"> - Merujuk pada judul atau penanda yang dilekatkan pada tokoh utama. - Gambaran pejabat ditampilkan sebagai figur sentral. - Masyarakat direpresentasikan melalui aktivitas ekonomi keseharian. - Ditunjukkan adanya perintah atau desakan untuk membayar pajak.
Konotasi	<ul style="list-style-type: none"> - "TAXMASTER" - Sosok dengan banyak tangan - Gestur menunjuk ke berbagai orang dengan kata "Pajak!" 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengandung konotasi bahwa negara diposisikan sebagai otoritas tunggal dan absolut dalam mengatur urusan fiskal warganya. - Menampilkan simbol kekuasaan negara yang bersifat omnipresent, seolah mampu

		menjangkau seluruh aspek kehidupan masyarakat. - Menyiratkan kritik bahwa setiap aktivitas rakyat berpotensi selalu dibebani kewajiban pajak.
Mitos	- Pajak sebagai instrumen negara - Negara sebagai figur hegemonik - Relasi negara dan rakyat	- Pajak tidak lagi dimaknai sebagai bentuk kontribusi kolektif, melainkan ditampilkan sebagai instrumen keserakahan struktural. - Negara digambarkan layaknya sosok mitologis yang mengendalikan kehidupan rakyat. - Dalam representasi ini, negara diposisikan sebagai predator fiskal, sedangkan rakyat ditempatkan sebagai objek yang terus-menerus menjadi sasaran.

Pada gambar 2 dapat bernarasi pajak dipersepsikan bukan lagi sebagai kewajiban kolektif untuk pembangunan, melainkan sebagai wujud keserakahan struktural negara. Sosok "TAXMASTER" bertransformasi menjadi figur hegemonik yang mengawasi dan menarik pajak dari setiap aspek kehidupan warganya. Mitos yang dihasilkan adalah negara sebagai entitas absolut yang mengekang warganya dengan instrumen pajak, meniadakan ruang bebas bagi masyarakat untuk bernapas di luar logika fiskal.

Dalam kerangka representasi, gambar 2 dianalisis melalui tiga pendekatan:

1. Reflektif, meme ini merefleksikan kondisi sosial-ekonomi di Indonesia, di mana masyarakat merasa selalu dikejar kewajiban pajak dalam setiap aspek kehidupan (konsumsi, transaksi digital, dan kepemilikan barang).
2. Intensional, pembuat meme sengaja membangun figur "TAXMASTER" untuk menyindir pemerintah sebagai penguasa pajak yang dominan. Intensinya jelas: mengkritik pemerintah yang terlalu agresif dalam kebijakan perpajakan.
3. Konstruksionis, makna tidak datang dari realitas apa adanya, melainkan dikonstruksi lewat visualisasi hiperbolis: sosok dengan banyak tangan, tudingan ke segala arah, dan repetisi kata "PAJAK!". Semua ini membangun representasi tentang relasi kuasa yang timpang, pemerintah yang serba hadir versus rakyat yang tak berdaya.

Negara direpresentasikan sebagai entitas hegemonik yang serakah, sementara rakyat digambarkan sebagai pihak yang tidak berdaya menghadapi instrumen fiskal. Kata "Pajak!" yang terus diulang menegaskan *oppositional reading* publik terhadap wacana resmi negara yang biasanya menggambarkan pajak sebagai bentuk gotong royong pembangunan.

2. Pembahasan

Analisis terhadap dua meme dari akun Instagram @redi_redz dan @wirtams memperlihatkan bahwa meme digital berfungsi sebagai media efektif bagi masyarakat untuk melayangkan kritik terhadap kebijakan fiskal. Kedua meme tersebut menampilkan pola narasi yang sama: pemerintah digambarkan sebagai pihak yang berkuasa dan mendominasi, sementara rakyat diposisikan sebagai pihak yang lemah dan dibebani.

Pada meme pertama karya @redi_redz, pajak divisualisasikan sebagai beban berat. Secara harfiah (denotasi), meme ini menampilkan sosok pejabat yang duduk santai di kursi besar, sementara orang-orang di bawahnya tampak terbebani oleh papan-papan pajak. Representasi ini menciptakan makna tersirat (konotasi) tentang ketidakberdayaan rakyat menghadapi sistem perpajakan yang menindas. Mitos yang terbangun adalah bahwa pajak, yang seharusnya menjadi alat pembangunan kolektif, justru berubah fungsi menjadi instrumen penindasan birokrasi. Analisis ini diperkuat oleh teori representasi Stuart Hall: meme ini secara reflektif menyuarakan kegelisahan publik; secara intensional, pembuatnya menggunakan kalimat "Pajak apa lagi ya..." sebagai sindiran; dan secara konstruksionis, simbol-simbol visual seperti kursi kekuasaan dan orang-orang yang merunduk digunakan untuk membentuk narasi beban ekonomi yang dialami masyarakat.

Sementara itu, meme kedua karya @wirtams lebih menonjolkan sifat rakus negara. Tanda-tanda visualnya (denotasi) menampilkan sosok "TAXMASTER" dengan banyak tangan yang berteriak "Pajak!". Hal ini mengonotasikan bahwa pemerintah adalah otoritas absolut yang dapat menjangkau dan memajaki setiap aspek kehidupan rakyat. Mitos yang muncul adalah bahwa negara bertindak sebagai entitas serakah yang mengendalikan warganya melalui instrumen pajak, sehingga tidak ada lagi ruang kebebasan bagi masyarakat di luar aturan fiskal. Dalam kerangka representasi Hall, meme ini secara reflektif menunjukkan perasaan rakyat yang terus dikejar pajak; secara intensional, kreatornya menyindir pemerintah sebagai penguasa pajak yang dominan; dan secara konstruksionis, metafora sosok bertangan banyak dan tudingan "Pajak!" mempertegas citra negara sebagai "predator fiskal."

Secara umum, kedua meme tersebut membongkar narasi resmi pemerintah yang mengkampanyekan pajak sebagai bentuk gotong royong untuk kemajuan bangsa. Sebaliknya, meme-meme ini justru menciptakan makna tandingan (*oppositional reading*), yang menganggap pajak sebagai beban dan alat eksploitasi. Fenomena ini sesuai dengan pandangan Stuart Hall bahwa representasi tidak bersifat netral, melainkan menjadi arena di mana berbagai pihak berupaya merebut dominasi makna, dan juga di mana

masyarakat bisa menolak wacana dominan negara dan membangun narasi mereka sendiri. Meme visual bukan hanya sekadar hiburan, melainkan sebuah teks budaya yang mengartikulasikan bentuk perlawanan simbolik masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil.

Temuan dari analisis ini memiliki implikasi penting. Secara teoretis, ini membuktikan bahwa semiotika Barthes dan teori representasi Hall masih sangat relevan untuk mengkaji komunikasi politik di era digital. Meme menjadi medium yang kuat untuk menggeser makna dan memicu perlawanan simbolis. Secara praktis, penelitian ini menekankan bahwa pemerintah harus melihat meme sebagai cerminan kegelisahan sosial yang sesungguhnya, bukan hanya lelucon. Jika diabaikan, kritik melalui meme dapat merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun komunikasi yang lebih terbuka, transparan, dan responsif terhadap kritik publik yang muncul dari ranah digital.

KESIMPULAN

Analisis terhadap dua meme karya akun Instagram @redi_redz dan @wirtams memperlihatkan bahwa ruang digital menjadi arena strategis bagi masyarakat dalam menyuarakan kritik yang kreatif terhadap kebijakan pajak negara. Kedua meme sama-sama menampilkan narasi pajak sebagai beban struktural dan instrumen penindasan, meskipun dengan gaya visual yang berbeda. Melalui kerangka semiotika Roland Barthes, makna yang terkandung dalam tanda-tanda visual menunjukkan proses pergeseran dari level denotasi menuju konotasi hingga mitos, di mana pajak tidak lagi dipersepsikan sebagai kontribusi kolektif, melainkan sebagai simbol eksploitasi rakyat oleh negara.

Jika dilihat melalui perspektif representasi Stuart Hall, kedua meme merepresentasikan resistensi masyarakat terhadap wacana hegemonik negara. Representasi reflektif dalam meme mencerminkan keresahan publik atas banyaknya pungutan pajak, representasi intensional menyiratkan maksud satiris dari kreator meme, sedangkan representasi konstruksionis menegaskan bahwa realitas fiskal dibangun ulang melalui konstruksi simbolis yang menolak narasi dominan negara.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan penggunaan semiotika Barthes dan teori representasi Hall dalam memahami praktik komunikasi politik digital di era media sosial. Meme berfungsi tidak hanya sebagai hiburan populer, tetapi juga sebagai teks budaya yang memuat kritik, resistensi, dan negosiasi makna terhadap kebijakan publik. Secara praktis, penelitian ini menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk tidak memandang meme hanya sebagai bentuk ekspresi ringan, melainkan sebagai representasi kegelisahan sosial yang nyata. Jika dikelola dengan baik, kritik yang termuat dalam meme dapat menjadi bahan refleksi untuk merumuskan kebijakan yang lebih partisipatif, adil, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Meme digital berperan sebagai sarana komunikasi alternatif yang memungkinkan rakyat menegosiasikan, bahkan menolak, wacana resmi negara terkait pajak. Di dalam ruang digital, masyarakat menemukan ruang bebas

untuk menyampaikan kritik sosial dengan bahasa visual yang sederhana, humoris, namun sarat makna politik.

REFERENSI

- Barthes, R. (2015). *Mythologies* (A. Lavers, Trans.). New York: Hill and Wang. (Original work published 1957)
- Bastari, R. P., Lukito, W., & Adhika, F. A. (2021). Internet Meme: A Virtual Visual Artefact of Digital Visual Culture: Case Study: 2018 - 2020. *Jurnal Rupa*, 6(1), 16-23. <https://doi.org/10.25124/rupa.v6i1.2928>
- Chandler, D. (2017). *Semiotics: The basics* (3rd ed.). New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315726274>
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage Publications.
- DDTCNews. (2025, Januari 15). Tak ada rencana naikan tarif pajak, Sri Mulyani fokus pada dua hal ini. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1813380/tak-ada-rencana-naikkan-tarif-pajak-sri-mulyani-fokus-pada-2-hal-ini>
- Detik.com. (2024, Desember 12). Sri Mulyani sebut PPN 12% masih rendah dibanding negara lain. Diakses dari <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7689018/sri-mulyani-sebut-ppn-12-masih-rendah>
- Dhobi, S. (2022). Sociological Dimensions of Representation: Othering & Stereotyping. *Patan Pragma*, 11(02), 163-173. <https://doi.org/10.3126/pragma.v11i02.52113>
- Fuchs, C. (2023). A Marxist-Humanist perspective on Stuart Hall's communication theory. *Theory and Society*, 52(6), 995-1029. <https://doi.org/10.1007/s11186-023-09524-5>
- Hamid, A. I. (2020). Analisis Semiotik Meme Anies Baswedan Banjir Jakarta. *Jurnal Dialektika Komunika*, 8(1), 36-45. <https://doi.org/10.33592/DK.V8I1.554>
- Highfield, T., & Leaver, T. (2016). Instagrammatics and Digital Methods: Studying Visual Social Media, from Selfies and GIFs to Memes and Emoji. *Communication Research and Practice*, 2(1), 47-62. <https://doi.org/10.1080/22041451.2016.1155332>
- Milner, R. M. (2016). *The World Made Meme: Public Conversations and Participatory Media*. MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/10238.001.0001>

- Rahmawati, C., Busri, H., & Badrih, Moh. (2024). Makna Denotasi dan Konotasi Meme dalam Media Sosial Twitter: Kajian Semiotika Roland Barthes. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 10(2), 1244–1256.
<https://doi.org/10.30605/onoma.v10i2.3479>
- Pratiwi, D. P. E., Sulatra, I. K., & Dewangga, I. G. A. (2023). Deconstructing Internet Memes through Semiotic Analysis: Unveiling Myths and Ideologies in Visual and Verbal Signs. *Jurnal Arbitrer*, 10(1), 76–85. <https://doi.org/10.25077/ar.10.1.76-85.2023>
- Putra, A. E., Aditriyana, M. R., Widya, N. S., & Nurhadi, Z. F. (2023). Meme Politik Sebagai Representasi Komunikasi Kritis Di Media Sosial. *Jurnal Syntax Fusion*, 3(09), 1004–1017.
<https://doi.org/10.54543/fusion.v3i09.363>
- Safitri, D. (2023). Indonesia Representasi Feminisme dalam Drama Netflix “The Glory Season 1” (Analisis Semiotika John Fiske). *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 4(2), 80-88.
<https://doi.org/10.31294/jpr.v4i2.2754>
- Subbiramaniyan, V., Apte, C., & Ali Mohammed, C. (2022). A Meme-Based Approach for Enhancing Student Engagement and Learning in Renal Physiology. *Advances in Physiology Education*, 46(1), 27-29.
<https://doi.org/10.1152/advan.00092.2021>
- Wahyudi, W. B. (2020). The brief explanation of representation according to Stuart Hall. Diakses dari <https://udayanetworking.unud.ac.id/lecturer/scientific/1626-wahyu-budi-nugroho/the-brief-explanation-of-representation-according-stuart-hall-1097>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Los Angeles: Sage Publications.
- Zhang, N. (2023). Toward a Phenomenological Understanding of Internet-Mediated Meme-ing as a Lived Experience in Social Distancing via Autoethnography. *Journal of Contemporary Ethnography*, 53(2), 181-211.
<https://doi.org/10.1177/08912416231216980>